

BAB II

KONTEKS SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK KOTA BALIKPAPAN

2.1 Sejarah Kota Balikpapan

Nama Balikpapan berasal dari bahasa Melayu, dikutip dalam (Wibisono, 2021) dalam buku karya F. Valenijn yang diterbitkan pada tahun 1724, di mana dalam buku itu disebutkan ada suatu daerah di hulu sungai yang berada di teluk dengan jarak sekitar tiga mil dari pantai, dan tempat itu bernama “BILIPAPAN”. Menurut cerita, nama Bilipapan berkaitan dengan adanya komunitas pedesaan di teluk yang kini dikenal dengan nama Teluk Balikpapan. Menurut legendanya, asal usul nama Balikpapan berasal dari sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1739. Pada saat itu kota berada di bawah Pemerintahan Sultan Muhammad Idris dari Kerajaan Kutai.

Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki Gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Dikutip dalam (Multianatha, 2023) penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten, dari JH Menten dan Firma Samuel & Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai. Di awal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak di Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan. Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi “Kota Minyak” dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan yang mencapai 86 juta barrel

per tahun. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri.

2.2 Kondisi Geografis Kota Balikpapan

Kota Balikpapan berada di bagian tenggara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 511,01 km² atau sekitar 0,40% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan (RTRW) Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.

Topografi wilayah Kota Balikpapan sebagian besar merupakan wilayah bukit dengan beberapa daerah landai di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai. Sekitar 61 persen wilayah Kota Balikpapan memiliki ketinggian lebih dari 20 meter, 25 persen berada di ketinggian 0-10 meter dan sisanya pada ketinggian 10-

20 meter dari permukaan laut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 7 Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Perda Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

2.3 Kondisi Demografi Kota Balikpapan

Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga di Provinsi Kalimantan Timur, setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2022 sebanyak 703.611 jiwa, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,26% dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Rasio jenis kelamin 104,51 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 104 hingga 105 laki-laki di antara 100 perempuan.

Gambar 2.1

Statistik Kependudukan Kota Balikpapan

Uraian	Satuan	Jumlah
Jumlah Penduduk	Jiwa	703 611
Laki-laki		359 563
Perempuan		344 048
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,26
Kepadatan Penduduk	jiwa/km ²	1 377
Rasio Jenis Kelamin	%	104,51

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2022

Secara etnografis, Kota Balikpapan mempunyai beberapa kelompok etnik yaitu Banjar, Bugis, Makassar, Jawa, serta pendatang lain yang di antaranya beretnis Manado, Gorontalo, Madura, Sunda, dan lain-lain. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, paser, kutai, banjar, banjar, bugis, jawa, dan lain-lain.

2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Kota Balikpapan

Kota Balikpapan yang memiliki kondisi geografis yang kurang subur dan memiliki jenis tanah yang berbeda, menyebabkan Balikpapan berkembang menjadi daerah yang mengutamakan sektor perkebunan, namun lahan perkebunan tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Balikpapan. Hal ini disebabkan karena penduduk kota, termasuk para pendatang yang tinggal di Kota Balikpapan, lebih memilih sektor perdagangan sebagai mata pencaharian utama mereka.

Selain itu, kegiatan ekonomi industri pengolahan minyak dan gas bumi juga membuat Kota Balikpapan dikenal sebagai "Kota Minyak". Julukan ini bukan karena Kota Balikpapan merupakan daerah penghasil minyak, melainkan karena Kota Balikpapan menjadi pusat industri pengolahan minyak mentah yang bahan bakunya diimpor dari daerah sekitar, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasir, Kutai Timur, dan bahkan Kalimantan Selatan.

Penduduk Kota Balikpapan didominasi oleh pendatang yang ditandai dengan jumlah yang sedikit dari suku asli, yaitu suku Paser. Meskipun penduduk Balikpapan berasal dari berbagai suku yang berbeda, mereka tetap menjaga harmoni dan kedamaian. Kehidupan bermasyarakat di Balikpapan yang penuh dengan keberagaman etnis menciptakan kelompok-kelompok berdasarkan etnis,

seperti contohnya adalah keluarga pendatang miskin. Mereka menggunakan ikatan etnis untuk bertahan hidup, walaupun sebagian dari mereka yang bekerja sebagai petani belum mampu meningkatkan modal dari hasil produksi. (Mutmainnah et al., 2014).

Kehadiran LSM, Ormas, dan Organisasi Keagamaan memberikan peran dalam mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kesenjangan ekonomi, ketimpangan akses terhadap layanan publik, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan agama atau suku. Dengan mengadakan program dan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, mereka berusaha mencegah konflik sosial dan membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung di dalam lingkungan masyarakat.

2.5 Kondisi Politik Lokal Kota Balikpapan: Menguatnya Bani Mas'ud

Di Kota Balikpapan, Bani Mas'ud atau yang juga dikenal sebagai Keluarga Besar Mas'ud merupakan keluarga yang sangat dihormati dan memiliki bisnis yang tersebar di berbagai sektor. Mereka merupakan anak keturunan dari H. Mas'ud dan Hj. Syarifah Ruwaidah Alqadri yang terdiri dari 8 (delapan) bersaudara yaitu, Hasanudin Mas'ud, Saharia Mas'ud, Rahmad Mas'ud, Yuliana Mas'ud, Rudy Mas'ud, Siti Aisyah Mas'ud, Hijrah Mas'ud, dan Abdul Gaffur Mas'ud. Salah satu usaha yang mereka bangun adalah perusahaan PT Barokah Perkasa Group yang didirikan pada tahun 2000 dan pemiliknya adalah Rudy Mas'ud. Perusahaan ini bergerak di bidang transportasi bahan bakar penunjang eksplorasi migas lepas pantai, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar. Perusahaan miliknya

memiliki 63 kapal tanker yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke (Sumarsono, 2019).

Di sisi lain, sang kakak, Rahmad Mas'ud merupakan pemilik perusahaan PT Sinar Pasifik yang berfokus pada perkapalan, pertambangan, dan pengeboran minyak dan gas. Rahmad Mas'ud juga memasuki dunia politik dengan bergabung dalam partai Golkar dan berhasil memenangkan posisi Wakil Wali Kota Balikpapan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Balikpapan tahun 2015 mendampingi Rizal Effendi sebagai Wali Kota Balikpapan. Saat ini, Rahmad Mas'ud juga menjabat sebagai Ketua DPD tingkat II Partai Golkar Kota Balikpapan. Tiga tahun kemudian, pada tahun 2018, adik mereka Abdul Gafur Mas'ud, ikut maju untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan berhasil memenangkan Pilbup PPU 2018. Saat ini, Gafur Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan (Kartono, 2021).

Selain itu, beberapa anggota keluarga Mas'ud yang lain juga terlibat dalam dunia politik, yaitu Hasanuddin Mas'ud, dan Rudy Mas'ud. Masing-masing dari mereka menjabat sebagai Anggota Dewan di tingkat Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, kakak beradik Hasan Mas'ud dan Rudy Mas'ud maju sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Kaltim dan DPR RI. Rudy Mas'ud berhasil mendapatkan suara terbanyak di Kaltim sebanyak 128.910 pemilih dan berhasil masuk ke DPR RI mewakili Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Timur. Saat ini, Rudy Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPD tingkat I Partai Golkar Kalimantan Timur. Keberhasilan Rudy diikuti oleh kakaknya,

Hasanuddin Mas'ud, yang berhasil masuk ke DPRD Provinsi Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan dengan perolehan suara sebanyak 19.959 dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim sekaligus Ketua DPD tingkat II Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara (Sestiani, 2023).

Dengan beberapa posisi jabatan politik strategis yang dimiliki oleh Bani Mas'ud, membuat mereka mampu membuka peluang untuk membangun jaringan politik yang luas. Melalui hubungan keluarga yang kuat, mereka dapat memperluas pengaruh politik mereka dan memperoleh dukungan yang lebih besar, baik dalam hal kebijakan yang diusulkan maupun dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan.

2.6 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020: Kemunculan Calon Tunggal dan Kotak Kosong

Kota Balikpapan menjadi salah satu dari 25 Kabupaten atau Kota yang menggelar Pemilukada yang menghadirkan calon tunggal. Menariknya, satu tahun sebelum Pemilukada Kota Balikpapan berlangsung, belum ada pemberitaan yang mengindikasikan adanya calon tunggal. Dalam berbagai media cetak atau online, memprediksi terdapat tiga poros politik yang bersaing dalam perhelatan Pemilukada Kota Balikpapan tahun 2020. Poros pertama dipimpin oleh Rahmad Mas'ud dari Golkar dengan dukungan koalisi PDIP, Demokrat, dan PKB. Poros kedua dipimpin oleh Yohana Palupi Arita dari Nasdem bersama PPP, Hanura, dan Perindo. Poros ketiga dipimpin oleh Yaser Arafat dari Gerindra bersama PKS (Kuswanto, 2019).

Partai Golkar menjadi satu-satunya partai politik yang dapat mengusung sendiri bakal calon Wali Kota pada Pemilukada Kota Balikpapan tahun 2020. Kepastian itu diketahui setelah pleno KPU Balikpapan menetapkan Golkar peraih kursi terbanyak pada Pemilu 17 April 2019 lalu yakni dengan perolehan 11 kursi dari total 45 kursi yang ada. Menyusul PDIP dengan 8 kursi, Gerindra dan PKS masing-masing 6 kursi, Demokrat 4 kursi, Nasdem 3 kursi, PPP 3 kursi, Hanura 2 kursi, PKB dan Perindo masing-masing 1 kursi. Dengan begitu, sembilan partai politik lainnya yakni PDIP, PKS, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PPP, Hanura, PKB dan Perindo harus berkoalisi untuk dapat mengusung bakal calon Wali Kota, sebab mengacu pada aturan *threshold* yang harus mencapai paling sedikit 20% dari jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu.

Pada awal tahun 2020 sebelum memasuki masa pendaftaran di KPU, beberapa partai politik seperti Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, PPP, PKB, dan Demokrat membuka penjangkaran bakal calon Wali Kota Balikpapan dan Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2020 - 2025. Banyak tokoh masyarakat, tokoh agama dan elite politik yang antusias mendaftar, diantaranya seperti Rahmad Mas'ud, Sabaruddin Panrecale, Eddy Tarno, Rosyidi, Yaser Arafat, Solehuddin Siregar, Abdulloh, Safaruddin, Thohari Azis, Ahmad Basir, Syukri Wahid, Sayyid Fadly, Abriantinus, Benny Jago Rosyidi dan Arita Rizal Effendi yang merupakan istri dari Wali Kota Balikpapan aktif Rizal Effendi (Abdi, 2020). Kendati demikian, posisi Golkar yang keluar sebagai partai pemenang dengan jumlah perolehan kursi terbanyak dalam Pemilu tahun 2019 lalu memiliki keunggulan dalam menentukan bakal calon Wali Kota yang diusung dalam Pemilukada Kota Balikpapan tahun

2020. Hal ini tidaklah sulit bagi Golkar karena di samping itu partai ini juga memiliki kader potensial bernama Rahmad Mas'ud, yang juga pada saat itu sedang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2015 - 2020. Sebagai petahana, dengan kekuatan finansial serta keunggulan popularitas dan elektabilitas dapat menjadi magnet penarik bagi partai-partai lain. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap PKS yang dengan cepat memberikan dukungan secara resmi kepada Rahmad Mas'ud untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Balikpapan (Susilo, 2020).

Gambar 2.2

Penyerahan SK Rekomendasi DPP Golkar Kepada Rahmad Mas'ud



Sumber: <https://www.ajidkurniawan.com/2020/07/gajah-melawan-semut.html>

Mendekati waktu masa pendaftaran di KPU, DPP Partai Golkar secara resmi memberikan SK rekomendasi untuk mengusung Rahmad Mas'ud maju sebagai bakal calon Wali Kota Balikpapan dalam perhelatan Pemilu Kota Balikpapan tahun 2020. Sinyal kuat untuk mendukung Rahmad Mas'ud juga diberikan oleh Partai Demokrat yang mana pada saat itu ketua DPD Demokrat Balikpapan dijabat oleh adiknya sendiri yaitu Abdul Ghofur Mas'ud (Yasir, 2020). Pada saat yang sama, PDIP juga langsung mengambil langkah cepat untuk menyodorkan kadernya

yakni Thohari Aziz untuk dipaketkan dengan Rahmad Mas'ud sebagai bakal calon Wakil Wali Kota, dan Gerindra juga sudah mengambil sikap dengan memberikan SK rekomendasi melalui Ketua DPC Partai Gerindra Balikpapan yang langsung diserahkan kepada Rahmad Mas'ud (Zubaidah, 2020c).

Di samping itu, beberapa partai politik seperti Nasdem, PPP, Hanura, PKB, Perindo, dan PSI juga telah memberi sinyal untuk mendukung Ahmad Basir sebagai bakal calon Wali Kota Balikpapan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dukungan dari beberapa partai politik dapat memberikan warna pada perhelatan Pemilukada Kota Balikpapan tahun 2020. Dalam hal ini, dukungan dari Nasdem, PPP, Hanura, PKB, Perindo, dan PSI dapat memberikan keuntungan bagi Ahmad Basir dalam memenangkan kontestasi. Pada saat yang sama, bahwa Ahmad Basir juga telah mendapatkan SK rekomendasi persetujuan dari DPP Partai Nasdem dan beberapa partai politik, seperti Hanura, PPP, PKB, Perindo, dan PSI (Bagas, 2020).

Gambar 2.3

Sejumlah Elite Partai Koalisi Bersama Ahmad Basir



Sumber: <https://penasatu.com/nasdem-pastikan-usung-ahb-bacalon-walikota-balikpapan-2020/>

Pada pertemuan sejumlah elit dari beberapa partai ini menunjukkan bahwa Ahmad Basir memiliki dukungan yang kuat dari sejumlah partai politik dan telah

memenuhi syarat untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Balikpapan pada Pemilu Kota Balikpapan tahun 2020. Dengan jumlah 10 kursi yang dimiliki oleh partai koalisi, sudah cukup untuk mendukung Ahmad Basir maju sebagai bakal calon Wali Kota Balikpapan. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan bahwa Pemilu Kota Balikpapan tahun 2020 menjadi pertarungan yang menarik antara Ahmad Basir dengan petahana. Di mana Rahmad Mas'ud juga sudah mendapatkan SK rekomendasi persetujuan dari beberapa DPP partai politik lainnya seperti Golkar, PKS, Demokrat, PDIP dan Gerindra dengan total jumlah perolehan 35 kursi (Munthe, 2020).

Kendati demikian, saat mendekati masa pendaftaran di KPU, terjadi perubahan dinamika politik yang mana sebelumnya Pemilu Kota Balikpapan diprediksi menghadirkan lebih dari satu pasangan calon, justru hanya tertuju kepada satu pasangan calon. Partai politik yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Ahmad Basir seperti PPP, PKB, dan Perindo secara bergantian memberikan dukungan resmi kepada pasangan Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz (Hendra, 2020b), dan bahkan ketika masa pendaftaran sampai harus diperpanjang selama 3 hari, tetap tidak ada calon lain yang mengajukan, sehingga hanya pasangan Rahmad Mas'ud – Thohari Aziz yang resmi terdaftar di KPU sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2020 - 2025 (Daton & Aprian, 2020).

Pasca pendaftaran di KPU resmi ditutup, maka dengan begitu perhelatan Pemilu Kota Balikpapan tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yakni Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz. Kehadiran calon tunggal dilegalkan melalui putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 daerah dengan calon tunggal, hanya

ada pilihan setuju atau tidak terhadap calon tersebut. Keputusan MK yang ditindaklanjuti melalui PKPU Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dengan Satu Pasangan Calon Pasal 3a, 3b, 3c, 3d, dan 3e (Prianto et al., 2021). Putusan tersebut dipertegas dalam Pasal 54C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa KPU tetap bisa melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilu Pilkada walau hanya dengan satu pasangan calon, yang melawan kolom atau kotak kosong.

Keberadaan kotak kosong memberikan wadah bagi masyarakat di Kota Balikpapan yang tidak setuju dengan kandidat yang ada. Melalui kotak kosong, mereka dapat menyampaikan protes dan ketidakpuasan terhadap kondisi politik yang terjadi. Hal ini terlihat dari spontanitas yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang mana secara aktif mensosialisasikan dan mengkampanyekan kotak kosong sebagai alternatif yang dapat dipilih, dan dengan gagalnya Ahmad Basir, membuat sebagian masyarakat menjadi empati. Berkat upayanya yang gigih untuk maju dalam kontestasi pemilihan, terlihat dari sejumlah kelompok masyarakat yang datang dan memberikan plakat penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi (Laurens, 2020).

Gambar 2.3

Sejumlah Tokoh Relawan Kotak Kosong Bersama Ahmad Basir



Sumber: <https://nomorsatukaltim.com/basir-sudah-berjuang-maksimal/>

Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan relawan kotak kosong memberikan penghargaan kepada Ahmad Basir atas perjuangannya yang gagal mengikuti Pemilu, dan mengajak untuk bergabung mendukung dan mengkampanyekan kotak kosong. Pada saat yang sama, partai politik parlemen yang tersisa, Nasdem dan Hanura memberi pesan bahwa mereka telah mendapatkan arahan dari masing-masing DPP untuk bersikap mendukung dan mengkampanyekan kotak kosong (Anggraini, 2020). Relawan Kotak Kosong bekerjasama dengan melakukan pendirian posko dan pertemuan yang sesuai dengan protokol kesehatan, mengingat pada saat itu masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga mereka juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kepada masyarakat agar memilih kotak kosong.

Bersamaan dengan itu, berbagai kalangan dari elemen masyarakat di Kota Balikpapan yang lain juga memberikan respons terhadap fenomena calon tunggal tersebut dengan berbagai bentuk aksi dan inisiatif. Mereka menyadari pentingnya memiliki opsi alternatif dalam pemilihan dan ingin menyuarakan ketidakpuasan

terhadap situasi tersebut. Sebagai bentuk respons, mereka membentuk komunitas-komunitas dengan berbagai nama dari latar belakang yang berbeda, komunitas yang terbentuk dapat menjadi wadah bagi siapa saja yang mau bersama-sama mengkampanyekan kotak kosong sebagai simbol protes terhadap kondisi yang ada.

Gambar 2.4

Logo Jaringan Kotak Kosong (JKK) Balikpapan



Sumber: <https://www.facebook.com/groups/697022144221718>

Salah satu komunitas yang terbentuk adalah Jaringan Kotak Kosong (JKK). JKK adalah komunitas yang lahir dari Organisasi Masyarakat Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) yang peduli terhadap kondisi demokrasi yang ada di Kota Balikpapan. Dalam upayanya untuk mengawal dan mengkritisi kondisi tersebut, JKK melakukan sosialisasi dan kampanye agar masyarakat dapat memahami pentingnya opsi kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik. Jaringan yang dibentuk oleh seorang aktivis yang bernama Suriansyah terus bergerak secara sistematis. Bersama dengan segenap relawannya, JKK melakukan kampanye simpatik, yang bertujuan untuk memenangkan kotak kosong pada pelaksanaan Pemilu Kota Balikpapan tahun 2020. Dengan anggota relawan KoKos se-Kota Balikpapan yang sudah mencapai 5.000 relawan, JKK bersama para anggota

relawan terus memantau kegiatan oknum-oknum tertentu yang berusaha “bermain” dengan cara memasuki dan menjaga wilayah perkampungan penduduk terutama di lingkungan-lingkungan RT.

Di samping itu, JKK dan anggota relawan juga berusaha mensosialisasikan dan mengkampanyekan kotak kosong secara *door to door* atau dari lingkungan RT yang satu ke lingkungan RT lainnya (Widodo, 2020). Mereka mengingatkan bahwa pemilihan bukan hanya tentang memilih calon yang tersedia, tetapi juga tentang memperjuangkan hak untuk memiliki pilihan yang berkualitas. JKK menjadi salah satu penyambung lidah masyarakat yang ingin melihat perubahan dan peningkatan dalam sistem pemilihan, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses demokrasi. Penting juga untuk dicatat bahwa gerakan JKK bukanlah golongan yang abstain atau orang-orang yang tidak memilih sama sekali dalam sebuah perhelatan Pemilu, namun gerakan ini merupakan bentuk partisipasi aktif dari sejumlah warga negara dalam upayanya untuk menyampaikan aspirasinya secara damai melalui tindakan-protes politik alternatif yaitu dengan cara mendukung dan memilih kotak kosong dalam surat suara.